



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ASEP DADANG MULYANA  
2. Jabatan : HAKIM  
3. NHK : 17701

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.146.000.000

1. Tanah Seluas 145 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 193 m2 di SUKABUMI, WARISAN Rp. 36.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/107 m2 di SUKABUMI, WARISAN Rp. 155.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 379 m2/159 m2 di SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 331.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 23.650.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 17.803.687

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.518.953.687

**III. HUTANG**

Rp. 496.957.500

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.021.996.187

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.